



ABSTRACT

The debate concerning the concept of status in International Relations (IR) has always been associated with metrics. The categorization of “great powers,” “middle powers,” and “small powers” is assessed based on universally applicable standard indicators such as material capabilities, foreign policy characteristics, and international recognition. Existing studies tend to overlook the subjective dimensions of status. Literature on Indonesia’s foreign policy illustrates this tendency by becoming entrapped in an objective epistemology that overlooks the agency of this nation. This dissertation examines Indonesia’s status from an unexplored perspective, specifically from Indonesia’s own viewpoint as a conscious actor. Although the narrative of “Indonesia as a great power” is recognized by many academics, a thorough investigation into the foundations of this notion has yet to be conducted. By employing the personal identity concept from constructivism and enriching with developmental psychology concepts such as self-schema, spiritual self, and narrative identity, this dissertation aims to reveal how Indonesia constructs its identity as a great power. The research utilizes the discourse analysis and the discourse historical approach methods to interpret the texts of speeches delivered by Indonesian leaders from the pre-independence period to the era of Joko Widodo. This dissertation finds that since its inception, Indonesia has perceived its status as a great power rather than a middle power as widely accepted by most IR scholars. This belief is grounded in five elements: emotional expression (pathos), historical experience (national myth), cultural exceptionalism, geography and monuments, as well as national achievements and aspirations. These five elements constitute the source of Indonesia’s conviction in its greatness. This finding implies that the concept of status within IR necessitates reevaluation, taking into serious account the subjective dimension of nations.

Keywords: status; Indonesia’s foreign policy; great power; personal identity; discourse analysis



RINGKASAN

Disertasi ini mengkaji diskursus identitas negara besar Indonesia. Mayoritas penelitian yang sudah ada cenderung mengklasifikasikan Indonesia ke dalam kategori “kekuatan menengah” (*middle power*) berdasarkan kapabilitas material (ekonomi dan militer) serta karakteristik kebijakan luar negeri, dengan memfokuskan pada peran Indonesia di kancah internasional. Meskipun perspektif ideasional yang menekankan pada elemen identitas (yaitu bagaimana suatu negara memandang dirinya atau “*self-referrence attribution*”) sudah pernah disinggung dalam literatur terdahulu, namun kenyataannya elemen ini cenderung diabaikan dan dianggap kurang penting sebagai elemen penentu status suatu negara. Penelitian terdahulu berupaya meng-objektifikasi status Indonesia berdasarkan parameter-parameter “objektif” sehingga mengabaikan dimensi psikis negara sebagai aktor yang berkesadaran (*state’s personhood*). Disertasi ini hendak mengisi celah literatur tersebut dengan menawarkan perspektif berbeda terhadap status Indonesia. Menggunakan konsep identitas personal dari konstruktivisme dan dikombinasikan dengan pendekatan psikologi mengenai konsep “diri” (*Self*), disertasi ini mencoba mengungkap bagaimana pemimpin-pemimpin nasional Indonesia merepresentasikan identitas negara besar Indonesia. Menggunakan data-data primer berupa teks pidato presiden dan naskah tertulis pemimpin-pemimpin nasionalis Indonesia yang dianalisis menggunakan metode Analisis Wacana Kritis, disertasi ini menemukan bahwa Indonesia lebih condong dibingkai ke dalam konsep “negara besar” alih-alih “kekuatan menengah.” Narasi “negara besar” tersebut dibangun di atas lima pilar yaitu aspek emosional yang menciptakan kebanggaan nasional (*patos*), aspek sejarah kejayaan masa lampau (mitos nasional), eksepsionalisme budaya, geografi dan monumen, serta jejak diplomasi dan aspirasi nasional. Temuan ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian (*discrepancy*) antara analisis akademik dan keyakinan para pemimpin nasional Indonesia mengenai status Indonesia. Hal ini bukan berarti bahwa keyakinan tersebut tidak serta-merta membuat Indonesia dikategorikan sebagai negara besar. Temuan ini menunjukkan adanya paradoks status Indonesia; secara objektif Indonesia adalah kekuatan menengah (atau lebih tepatnya *great power aspirant*; di bawah level negara besar, namun di atas level kekuatan menengah), namun secara subjektif Indonesia merasa sebagai negara besar. Paradoks ini menunjukkan bahwa konsep status dalam Hubungan Internasional (HI) itu sangat *contested*; tidak ada tolok ukur standar dan baku yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan status suatu negara. Upaya saintifikasi untuk mencari teori umum yang dapat dipakai sebagai acuan standar adalah sia-sia belaka karena setiap negara memiliki keunikan cara pandang terhadap jati dirinya. Temuan disertasi ini mengimplikasikan bahwa konsep status dalam HI perlu dikeluarkan dari belenggu perspektif Eropasentrisme yang bias dan mengakomodasi perspektif-perspektif non-Barat sehingga membuka ruang bagi upaya dekolonisasi pengetahuan dengan cara pandang yang lebih plural.